



SALINAN

WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR 123 TAHUN 2022

TENTANG

PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-2-

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/ atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-3-

13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 288);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-4-

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
26. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1 Tahun 2019);
27. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2006, Nomor 13);
28. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 13);
29. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 5);
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 11 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2012 Nomor 11);
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2018 Nomor 2);
34. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2);



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-5-

36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 6);
37. Peraturan Walikota Makassar Nomor 85 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Makassar Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2022 Nomor 85)

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota, yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Makassar.
5. Perangkat Daerah adalah Unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
7. Pimpinan DPRD adalah Pimpinan DPRD Kota Makassar.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
9. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
10. Dana Transfer Umum adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan Daerah guna mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
11. Dana Transfer Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada Daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus, baik fisik maupun nonfisik yang merupakan urusan Daerah.
12. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
13. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DACI adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-6-

14. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
15. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
16. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. APBD Kota Makassar Tahun Anggaran 2023 berjumlah Rp5.666.377.647.700,00 (lima triliun enam ratus enam puluh enam milyar tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus empat puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah) terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------------|--------------------------|
| a. pendapatan daerah | : Rp4.766.438.430.840,00 |
| b. belanja daerah | : Rp5.648.477.147.700,00 |
| (defisit)/ surplus | : Rp882.038.716.860,00 |
| c. pembiayaan daerah: | |
| 1. Penerimaan pembiayaan | : Rp892.038.716.860,00 |
| 2. Pengeluaran pembiayaan | : Rp10.000.000.000,00 |
| Pembiayaan netto | : Rp882.038.716.860,00 |
| Sisa lebih pembayaran tahun berkenaan | : Rp0,00 |

Pasal 3

Ketentuan lebih lanjut mengenai APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini yang terdiri dari:

- | | |
|-----------------|---|
| a. Lampiran I | Ringkasan Penjabaran APBD yang diklasifikasi menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan; |
| b. Lampiran II | Penjabaran APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis, objek, rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan; |
| c. Lampiran III | Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran hibah; |
| d. Lampiran IV | Daftar nama penerima, alamat penerima dan besaran bantuan sosial; |

Pasal 4

Pelaksanaan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Wali kota ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



WALI KOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN

-7-

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2022

WALIKOTA MAKASSAR,

TTD

MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal, 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,

TTD

M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2022 NOMOR 123



Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kota Makassar

Muh. Izhar Kurniawan

KOTA MAKASSAR

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4	PENDAPATAN DAERAH	
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	2.360.626.669.320
4.1.01	Pajak Daerah	1.878.857.000.000
4.1.01.06	Pajak Hotel	160.000.000.000
4.1.01.06.01	Pajak Hotel	157.197.517.304
4.1.01.06.01.0001	Pajak Hotel	157.197.517.304
4.1.01.06.03	Pajak Losmen	2.135.237.921
4.1.01.06.03.0001	Pajak Losmen	2.135.237.921
4.1.01.06.08	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	667.244.775
4.1.01.06.08.0001	Pajak Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh)	667.244.775
4.1.01.07	Pajak Restoran	265.000.000.000
4.1.01.07.01	Pajak Restoran dan Sejenisnya	135.794.649.140
4.1.01.07.01.0001	Pajak Restoran dan Sejenisnya	135.794.649.140
4.1.01.07.02	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	47.955.628.686
4.1.01.07.02.0001	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	47.955.628.686
4.1.01.07.03	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	43.958.878.890
4.1.01.07.03.0001	Pajak Kafetaria dan Sejenisnya	43.958.878.890
4.1.01.07.05	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.988.118.693
4.1.01.07.05.0001	Pajak Warung dan Sejenisnya	16.988.118.693
4.1.01.07.07	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.302.724.591
4.1.01.07.07.0001	Pajak Jasa Boga/Katering dan Sejenisnya	20.302.724.591
4.1.01.08	Pajak Hiburan	105.000.000.000
4.1.01.08.01	Pajak Tontonan Film	101.887.419.964
4.1.01.08.01.0001	Pajak Tontonan Film	101.887.419.964
4.1.01.08.02	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.546.150
4.1.01.08.02.0001	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana	17.546.150
4.1.01.08.04	Pajak Pameran	4.500.000
4.1.01.08.04.0001	Pajak Pameran	4.500.000
4.1.01.08.05	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.638.611.743
4.1.01.08.05.0001	Pajak Diskotik, Karaoke, Klub Malam, dan Sejenisnya	1.638.611.743
4.1.01.08.07	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	4.204.000
4.1.01.08.07.0001	Pajak Permainan Biliar dan Bowling	4.204.000
4.1.01.08.08	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	513.445.958
4.1.01.08.08.0001	Pajak Pacuan Kuda, Kendaraan Bermotor, dan Permainan Ketangkasan	513.445.958
4.1.01.08.09	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	932.860.134
4.1.01.08.09.0001	Pajak Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap/Spa dan Pusat Kebugaran (Fitness Center)	932.860.134
4.1.01.08.10	Pajak Pertandingan Olahraga	1.412.051
4.1.01.08.10.0001	Pajak Pertandingan Olahraga	1.412.051
4.1.01.09	Pajak Reklame	85.000.000.000
4.1.01.09.01	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	84.227.075.300
4.1.01.09.01.0001	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron	84.227.075.300
4.1.01.09.02	Pajak Reklame Kain	607.944.500
4.1.01.09.02.0001	Pajak Reklame Kain	607.944.500
4.1.01.09.03	Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.860
4.1.01.09.03.0001	Pajak Reklame Melekat/Stiker	20.860
4.1.01.09.05	Pajak Reklame Berjalan	103.843.750
4.1.01.09.05.0001	Pajak Reklame Berjalan	103.843.750
4.1.01.09.06	Pajak Reklame Udara	58.875.000
4.1.01.09.06.0001	Pajak Reklame Udara	58.875.000
4.1.01.09.08	Pajak Reklame Suara	300.000
4.1.01.09.08.0001	Pajak Reklame Suara	300.000
4.1.01.09.09	Pajak Reklame Film/Slide	450.000
4.1.01.09.09.0001	Pajak Reklame Film/Slide	450.000
4.1.01.09.10	Pajak Reklame Peragaan	1.490.590
4.1.01.09.10.0001	Pajak Reklame Peragaan	1.490.590
4.1.01.10	Pajak Penerangan Jalan	315.000.000.000
4.1.01.10.01	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	314.985.000.000
4.1.01.10.01.0001	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri	314.985.000.000
4.1.01.10.02	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000
4.1.01.10.02.0001	Pajak Penerangan Jalan Sumber Lain	15.000.000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4 1 01 11	Pajak Parkir	128 807 000 000
4 1 01 11 01	Pajak Parkir	128 807 000 000
4 1 01 11 01 0001	Pajak Parkir	128 807 000 000
4 1 01 12	Pajak Air Tanah	15 000 000 000
4 1 01 12 01	Pajak Air Tanah	15 000 000 000
4 1 01 12 01 0001	Pajak Air Tanah	15 000 000 000
4 1 01 13	Pajak Sarang Burung Walet	50 000 000
4 1 01 13 01	Pajak Sarang Burung Walet	50 000 000
4 1 01 13 01 0001	Pajak Sarang Burung Walet	50 000 000
4 1 01 15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	320 000 000 000
4 1 01 15 01	PBBP2	320 000 000 000
4 1 01 15 01 0001	PBBP2	320 000 000 000
4 1 01 16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	485 000 000 000
4 1 01 16 01	BPHTB-Pemindahan Hak	245 000 000 000
4 1 01 16 01 0001	BPHTB-Pemindahan Hak	245 000 000 000
4 1 01 16 02	BPHTB-Pemberian Hak Baru	240 000 000 000
4 1 01 16 02 0001	BPHTB-Pemberian Hak Baru	240 000 000 000
4 1 02	Retribusi Daerah	222 782 665 000
4 1 02 01	Retribusi Jasa Umum	54 922 665 000
4 1 02 01 01	Retribusi Pelayanan Kesehatan	3 071 040 000
4 1 02 01 01 0001	Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas	3 071 040 000
4 1 02 01 02	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45 388 200 000
4 1 02 01 02 0001	Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan	45 388 200 000
4 1 02 01 03	Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Penguburan Mayat	626 528 000
4 1 02 01 03 0001	Retribusi Pelayanan Penguburan/Pemakaman termasuk Penggalian dan Pengurusan serta Pembakaran/Penguburan Mayat	626 528 000
4 1 02 01 06	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3 186 897 000
4 1 02 01 06 0001	Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	3 186 897 000
4 1 02 01 07	Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran	1500 000 000
4 1 02 01 07 0001	Retribusi Pelayanan Pemeriksaan dan/atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran	1 500 000 000
4 1 02 01 09	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 000 000 000
4 1 02 01 09 0001	Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus	1 000 000 000
4 1 02 01 11	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	150 000 000
4 1 02 01 11 0001	Retribusi Pelayanan Pengujian Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya	150 000 000
4 1 02 02	Retribusi Jasa Usaha	31 903 000 000
4 1 02 02 01	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	29 665 000 000
4 1 02 02 01 0001	Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan	27 655 000 000
4 1 02 02 01 0002	Retribusi Penyewaan Tanah	510 000 000
4 1 02 02 01 0005	Retribusi Pemakaian Ruangan	1 500 000 000
4 1 02 02 03	Retribusi Tempat Pelelangan	2 000 000 000
4 1 02 02 03 0001	Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan	2 000 000 000
4 1 02 02 10	Retribusi Penyeberangan di Air	88 000 000
4 1 02 02 10 0001	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang	88 000 000
4 1 02 02 11	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	150 000 000
4 1 02 02 11 0004	Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan	150 000 000
4 1 02 03	Retribusi Perizinan Tertentu	135 957 000 000
4 1 02 03 01	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	135 000 000 000
4 1 02 03 01 0001	Retribusi Pemberian Izin Mendirikan Bangunan	135 000 000 000
4 1 02 03 02	Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	945 000 000
4 1 02 03 02 0001	Retribusi Pemberian Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	945 000 000
4 1 02 03 03	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12 000 000
4 1 02 03 03 0001	Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum	12 000 000
4 1 03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	88 098 282 000
4 1 03 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	87 992 682 000
4 1 03 02 01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25 000 000 000
4 1 03 02 01 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Lembaga Keuangan)	25 000 000 000
4 1 03 02 02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	25 653 037 000
4 1 03 02 02 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Aneka Usaha)	25 653 037 000
4 1 03 02 03	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD (Bidang Air Minum)	37 339 645 000
4 1 03 02 03 0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Daerah/BUMD (Bidang Air Minum)	37 339 645 000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.1.03.03	Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	105 600 000
4.1.03.03.01	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	105 600 000
4.1.03.03.01.0001	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	105 600 000
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	170 888 722 320
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	645 934 000
4.1.04.01.02	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	265 934 000
4.1.04.01.02.0002	Hasil Penjualan Alat Angkutan	265 934 000
4.1.04.01.03	Hasil Penjualan Gedung dan Bangunan	80 000 000
4.1.04.01.03.0001	Hasil Penjualan Bangunan Gedung	80 000 000
4.1.04.01.06	Hasil Penjualan Aset Lainnya	300 000 000
4.1.04.01.06.0002	Hasil Penjualan Aset Lainnya-Aset Lain-Lain	300 000 000
4.1.04.03	Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	4 000 000 000
4.1.04.03.01	Hasil Sewa BMD	4 000 000 000
4.1.04.03.01.0001	Hasil Sewa BMD	4 000 000 000
4.1.04.05	Jasa Giro	35 000 000 000
4.1.04.05.01	Jasa Giro pada Kas Daerah	35 000 000 000
4.1.04.05.01.0001	Jasa Giro pada Kas Daerah	35 000 000 000
4.1.04.08	Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	15 000 000 000
4.1.04.08.02	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15 000 000 000
4.1.04.08.02.0001	Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain	15 000 000 000
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1 350 000 000
4.1.04.09.01	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1 350 000 000
4.1.04.09.01.0001	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1 350 000 000
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37 000 000 000
4.1.04.11.01	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37 000 000 000
4.1.04.11.01.0001	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	37 000 000 000
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	8 500 000 000
4.1.04.15.01	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	6 840 000 000
4.1.04.15.01.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 21	6 840 000 000
4.1.04.15.03	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 000 000 000
4.1.04.15.03.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	1 000 000 000
4.1.04.15.04	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	660 000 000
4.1.04.15.04.0001	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas Dalam Negeri-Perjalanan Dinas Biasa	660 000 000
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	69 392 788 320
4.1.04.16.01	Pendapatan BLUD	69 392 788 320
4.1.04.16.01.0001	Pendapatan BLUD	69 392 788 320
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.378.861.172.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1 958 661 172 000
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1 958 661 172 000
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	127 959 990 000
4.2.01.01.01.0001	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	1 599 241 000
4.2.01.01.01.0003	DBH PPh Pasal 25 dan Pasal 29/WPOPON	122 269 547 000
4.2.01.01.01.0004	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0
4.2.01.01.01.0006	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	212 760 000
4.2.01.01.01.0009	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	1 817 718 000
4.2.01.01.01.0010	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan- Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	55 513 000
4.2.01.01.01.0013	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2 005 211 000
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	1 383 437 987 000
4.2.01.01.02.0001	DAU	1 383 437 987 000
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik	447 263 195 000
4.2.01.01.04.0001	DAK Non Fisik-BOS Reguler	181 064 500 000
4.2.01.01.04.0003	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	6 075 000 000
4.2.01.01.04.0004	DAK Non Fisik-TPG PNSD	184 268 253 000
4.2.01.01.04.0005	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	4 901 750 000
4.2.01.01.04.0007	DAK Non Fisik-BOP PAUD	12 416 400 000
4.2.01.01.04.0008	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	5 441 200 000
4.2.01.01.04.0009	DAK Non Fisik-BOP Museum dan Taman Budaya-Museum	1 200 000 000
4.2.01.01.04.0011	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	40 159 783 000
4.2.01.01.04.0012	DAK Non Fisik-BOKKB-Pengawasan Obat dan Makanan	581 702 000
4.2.01.01.04.0014	DAK Non Fisik-BOKKB-Jaminan Persalinan	0

KOTA MAKASSAR

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK, RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN

TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
4.2.01.01.04.0015	DAK Non Fisik-BOKKB-BOKB	9.437.062.000
4.2.01.01.04.0016	DAK Non Fisik-PK2UKM	406.770.000
4.2.01.01.04.0018	DAK Ncn Fisik-Dana Pelayanan Kepariwisataa	0
4.2.01.01.04.0020	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	323.400.000
4.2.01.01.04.0022	DAK NonFisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000
4.2.01.01.04.0023	DAK NonFisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian	548.575.000
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	0
4.2.01.02.01	DID	0
4.2.01.02.01.0001	DID	0
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	420.200.000.000
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	404.200.000.000
4.2.02.01.01	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	404.200.000.000
4.2.02.01.01.0001	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	150.000.000.000
4.2.02.01.01.0002	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	105.000.000.000
4.2.02.01.01.0003	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	88.000.000.000
4.2.02.01.01.0004	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	1.200.000.000
4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	60.000.000.000
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	16.000.000.000
4.2.02.02.02	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi	16.000.000.000
4.2.02.02.02.0001	Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi	16.000.000.000
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	26.950.589.520
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	26.950.589.520
4.3.03.02	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.950.589.520
4.3.03.02.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.950.589.520
4.3.03.02.01.0001	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	26.950.589.520
	Jumlah Pendapatan	4.766.438.430.840
5	BELANJA	
5.1	BELANJA OPERASI	3.808.609.860.707
5.1.01	Belanja Pegawai	1.484.019.138.206
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	857.644.086.863
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	639.082.116.416
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	570.898.146.016
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	68.183.970.400
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	57.109.586.441
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	47.985.596.673
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	9.123.989.768
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	14.571.892.000
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	14.564.990.000
5.1.01.01.03.0002	Belanja Tunjangan Jabatan PPPK	6.902.000
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	46.072.958.850
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	38.461.158.850
5.1.01.01.04.0002	Belanja Tunjangan Fungsional PPPK	7.611.800.000
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	10.912.671.749
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	10.912.671.749
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	35.879.080.162
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	29.456.740.582
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	6.422.339.580
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	6.993.716.000
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	6.993.716.000
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	1.202.650.626
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	1.202.076.590
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	574.036
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	37.129.756.694
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	33.458.541.174
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	3.671.215.520
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	2.279.041.537
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.068.026.137
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	211.018.400
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	6.410.613.388

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 01 01 11 0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	5 877 172 388
5 1 01 01 11 0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	533 441 000
5 1 01 02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	240 843 948 289
5 1 01 02 01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	233 559 182 499
5 1 01 02 01 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	233 514 982 499
5 1 01 02 01 0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	44 200 000
5 1 01 02 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN	6 973 965 790
5 1 01 02 03 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	6 973 965 790
5 1 01 02 04	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	310 800 000
5 1 01 02 04 0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi PNS	310 800 000
5 1 01 03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	283 448 759 000
5 1 01 03 01	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	45 812 144 500
5 1 01 03 01 0005	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	3 705 000 000
5 1 01 03 01 0007	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	7 790 000 000
5 1 01 03 01 0008	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	2 052 000 000
5 1 01 03 01 0009	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	2 280 000 000
5 1 01 03 01 0010	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	8 360 000 000
5 1 01 03 01 0011	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	3 663 019 500
5 1 01 03 01 0012	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	182 400 000
5 1 01 03 01 0013	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	1 425 000
5 1 01 03 01 0015	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan	8 658 300 000
5 1 01 03 01 0016	Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	9 120 000 000
5 1 01 03 02	Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	5 775 931 500
5 1 01 03 02 0002	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	811 250 000
5 1 01 03 02 0014	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	859 293 500
5 1 01 03 02 0016	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan	52 500 000
5 1 01 03 02 0024	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	2 700 000
5 1 01 03 02 0025	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	4 012 820 000
5 1 01 03 02 0026	Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	37 368 000
5 1 01 03 03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	184 268 253 000
5 1 01 03 03 0001	Belanja TPG PNSD	184 268 253 000
5 1 01 03 05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	4 901 750 000
5 1 01 03 05 0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	4 901 750 000
5 1 01 03 07	Belanja Honorarium	38 254 080 000
5 1 01 03 07 0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	32 365 560 000
5 1 01 03 07 0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	475 320 000
5 1 01 03 07 0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	5 413 200 000
5 1 01 03 08	Belanja Jasa Pengelolaan BMD	4 436 600 000
5 1 01 03 08 0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	263 400 000
5 1 01 03 08 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	4 173 200 000
5 1 01 04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	35 412 955 800
5 1 01 04 01	Belanja Uang Representasi DPRD	1 114 260 000
5 1 01 04 01 0001	Belanja Uang Representasi DPRD	1 114 260 000
5 1 01 04 02	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	168 403 200
5 1 01 04 02 0001	Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	168 403 200
5 1 01 04 03	Belanja Tunjangan Beras DPRD	197 957 100
5 1 01 04 03 0001	Belanja Tunjangan Beras DPRD	197 957 100
5 1 01 04 04	Belanja Uang Paket DPRD	95 508 000
5 1 01 04 04 0001	Belanja Uang Paket DPRD	95 508 000
5 1 01 04 05	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 615 677 000
5 1 01 04 05 0001	Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	1 615 677 000
5 1 01 04 06	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133 919 100
5 1 01 04 06 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	133 919 100
5 1 01 04 07	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	193 271 400
5 1 01 04 07 0001	Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	193 271 400
5 1 01 04 08	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8 820 000 000
5 1 01 04 08 0001	Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	8 820 000 000
5 1 01 04 09	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2 205 000 000
5 1 01 04 09 0001	Belanja Tunjangan Reses DPRD	2 205 000 000
5 1 01 04 10	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	466 230 000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5.1.01.04.10.0001	Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	466.230.000
5.1.01.04.12	Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	10.717.730.000
5.1.01.04.12.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	102.903.000
5.1.01.04.12.0002	Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD	8.101.000
5.1.01.04.12.0003	Belanja Jaminan Kematian DPRD	10.126.000
5.1.01.04.12.0004	Belanja Tunjangan Perumahan DPRD	10.596.600.000
5.1.01.04.13	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.660.000.000
5.1.01.04.13.0001	Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	9.660.000.000
5.1.01.04.14	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000
5.1.01.04.14.0001	Belanja Uang Jasa Pengabdian DPRD	25.000.000
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	4.384.861.220
5.1.01.05.01	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.01.0001	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000
5.1.01.05.02	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	7.644.000
5.1.01.05.03	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.200.000
5.1.01.05.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	102.200.000
5.1.01.05.04	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040
5.1.01.05.04.0001	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	8.111.040
5.1.01.05.05	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.200.000
5.1.01.05.05.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	4.200.000
5.1.01.05.06	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.680
5.1.01.05.06.0001	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	23.680
5.1.01.05.07	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.07.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.500.000
5.1.01.05.08	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.08.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.09	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH	925.000
5.1.01.05.10	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah	2.411.165.500
5.1.01.05.10.0006	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hotel	195.000.000
5.1.01.05.10.0007	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Restoran	410.000.000
5.1.01.05.10.0008	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Hiburan	108.000.000
5.1.01.05.10.0009	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Reklame	120.000.000
5.1.01.05.10.0010	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	440.000.000
5.1.01.05.10.0011	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Parkir	192.790.500
5.1.01.05.10.0012	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Air Tanah	9.600.000
5.1.01.05.10.0013	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	75.000
5.1.01.05.10.0015	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	455.700.000
5.1.01.05.10.0016	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	480.000.000
5.1.01.05.11	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/WKDH	1.789.567.000
5.1.01.05.11.0002	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Umum-Pelayanan Persampahan/Kebersihan	16.250.000
5.1.01.05.11.0014	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	64.677.000
5.1.01.05.11.0024	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah	540.000
5.1.01.05.11.0025	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Mendirikan Bangunan	1.700.000.000
5.1.01.05.11.0026	Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu-Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol	8.100.000
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	3.653.600.000
5.1.01.06.01	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000
5.1.01.06.01.0001	Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	453.600.000
5.1.01.06.02	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.200.000.000
5.1.01.06.02.0001	Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	3.200.000.000
5.1.01.08	Belanja Gaji dan Tunjangan Perangkat Lembaga Wali Nanggroe	330
5.1.01.08.03	Belanja Gaji dan Tunjangan Majelis Tinggi	330
5.1.01.08.03.0010	Belanja Pembulatan Gaji Majelis Tinggi	330
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	6.376.000.000
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	6.376.000.000
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	6.376.000.000
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	52.254.926.704
5.1.01.99.99	Belanja Pegawai BLUD	52.254.926.704
5.1.01.99.99.9999	Belanja Pegawai BLUD	52.254.926.704

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02	Belanja Barang dan Jasa	2 150 698 059 478
5 1 02 01	Belanja Barang	450 146 482 665
5 1 02 01 01	Belanja Barang Pakai Habis	450 146 482 665
5 1 02 01 01 0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	49 801 697 991
5 1 02 01 01 0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	2 166 442 150
5 1 02 01 01 0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	83 346 672 690
5 1 02 01 01 0008	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Tanaman	9 601 380 750
5 1 02 01 01 0009	Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	58 207 500
5 1 02 01 01 0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	298 091 000
5 1 02 01 01 0011	Belanja Bahan-Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan	277 230 000
5 1 02 01 01 0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	144 644 800
5 1 02 01 01 0013	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	10 271 422 600
5 1 02 01 01 0014	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Besar	3 500 141 500
5 1 02 01 01 0015	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Kedokteran	428 743 282
5 1 02 01 01 0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	554 110 000
5 1 02 01 01 0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	29 336 507 026
5 1 02 01 01 0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6 995 210 978
5 1 02 01 01 0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	1 533 454 000
5 1 02 01 01 0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor -Benda Pos	145 080 000
5 1 02 01 01 0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	13 322 473 700
5 1 02 01 01 0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	6 085 308 613
5 1 02 01 01 0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	18 403 557 303
5 1 02 01 01 0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15 843 507 700
5 1 02 01 01 0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	84 890 000
5 1 02 01 01 0035	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Suvenir/Cendera Mata	4 828 895 000
5 1 02 01 01 0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	19 432 356 774
5 1 02 01 01 0037	Belanja Obat-Obatan-Obat	16 740 502 069
5 1 02 01 01 0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	13 994 220 361
5 1 02 01 01 0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	19 867 813 228
5 1 02 01 01 0043	Belanja Natura dan Pakan-Natura	18 945 548 195
5 1 02 01 01 0045	Belanja Natura dan Pakan-Natura dan Pakan Lainnya	1 268 000
5 1 02 01 01 0050	Belanja Persediaan Dalam Proses-Persediaan Dalam Proses	1 368 000 000
5 1 02 01 01 0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	42 237 128 955
5 1 02 01 01 0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	29 187 770 000
5 1 02 01 01 0056	Belanja Makanan dan Minuman pada Fasilitas Pelayanan Urusan Kesehatan	199 800 000
5 1 02 01 01 0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	21 247 380 000
5 1 02 01 01 0063	Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	6 605 550 000
5 1 02 01 01 0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	1 443 414 000
5 1 02 01 01 0068	Belanja Pakaian Siaga	81 000 000
5 1 02 01 01 0071	Belanja Pakaian Kerja Laboratorium	1 200 000
5 1 02 01 01 0073	Belanja Pakaian KORPRI	31 850 000
5 1 02 01 01 0074	Belanja Pakaian Adat Daerah	1156 200 000
5 1 02 01 01 0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional	572 812 500
5 1 02 02	Belanja Jasa	1 125 258 236 030
5 1 02 02 01	Belanja Jasa Kantor	849 848 120 710
5 1 02 02 01 0002	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Menghasilkan Pendapatan	2 025 000 000
5 1 02 02 01 0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	51 135 305 000
5 1 02 02 01 0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretaris Tim Pelaksana Kegiatan	40 049 590 000
5 1 02 02 01 0005	Honorarium Pemberi Keterangan Ahli, Saksi Ahli dan Beracara	306 000 000
5 1 02 02 01 0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan	12 211 800 000
5 1 02 02 01 0007	Honorarium Rohaniwan	54 400 000
5 1 02 02 01 0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	1 160 140 000
5 1 02 02 01 0009	Honorarium Penyelenggara Ujian	418 200 000
5 1 02 02 01 0011	Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	860 750 000
5 1 02 02 01 0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	978 000 000
5 1 02 02 01 0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	40 404 000 000
5 1 02 02 01 0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	19 673 489 564
5 1 02 02 01 0015	Belanja Jasa Tenaga Laboratorium	281 950 000
5 1 02 02 01 0016	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Prasarana dan Sarana Umum	33 219 645 800
5 1 02 02 01 0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	38 417 600 000

KOTA MAKASSAR
REKAPITULASI PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 02 01 0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	7 830 000 000
5 1 02 02 01 0019	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Bencana	2 700 000 000
5 1 02 02 01 0020	Belanja Jasa Tenaga Penanganan Sosial	3 860 100 000
5 1 02 02 01 0021	Belanja Jasa Tenaga Sumber Daya Air	9 600 000
5 1 02 02 01 0023	Belanja Jasa Tenaga Teknis Pertanian dan Pangan	2 875 900 000
5 1 02 02 01 0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	8 880 400 080
5 1 02 02 01 0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	184 309 100 000
5 1 02 02 01 0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	3 012 050 000
5 1 02 02 01 0028	Belanja Jasa Tenaga Pelayanan Umum	16 994 205 000
5 1 02 02 01 0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	42 734 300 000
5 1 02 02 01 0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	147 297 895 621
5 1 02 02 01 0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan	5 177 028 500
5 1 02 02 01 0032	Belanja Jasa Tenaga Caraka	129 600 000
5 1 02 02 01 0033	Belanja Jasa Tenaga Supir	2 718 000 000
5 1 02 02 01 0034	Belanja Jasa Tenaga Juru Masak	336 000 000
5 1 02 02 01 0035	Belanja Jasa Tenaga Teknisi Mekanik dan Listrik	3 808 200 000
5 1 02 02 01 0036	Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	795 000 000
5 1 02 02 01 0037	Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	1 718 350 000
5 1 02 02 01 0039	Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	2 492 400 000
5 1 02 02 01 0041	Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik	493 721 840
5 1 02 02 01 0043	Belanja Jasa Penulisan dan Penerjemahan	100 000 000
5 1 02 02 01 0044	Belanja Jasa Pelayanan Perpustakaan	686 400 000
5 1 02 02 01 0045	Belanja Jasa Pelayanan Kearsipan	601 560 000
5 1 02 02 01 0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	250 000 000
5 1 02 02 01 0047	Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	4 762 000 000
5 1 02 02 01 0048	Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	200 000 000
5 1 02 02 01 0049	Belanja Jasa Pencucian Pakaian, Alat Kesenian dan Kebudayaan, serta Alat Rumah Tangga	600 000 000
5 1 02 02 01 0050	Belanja Jasa Kalibrasi	705 332 000
5 1 02 02 01 0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah	36 000 000
5 1 02 02 01 0052	Belanja Jasa Pemeliharaan, Pengendalian Hama, dan Fumigasi	1 747 490 000
5 1 02 02 01 0053	Belanja Jasa Pengukuran Tanah	578 197 600
5 1 02 02 01 0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemetretan	54 377 000 000
5 1 02 02 01 0057	Belanja Jasa Operator Kapal	465 000 000
5 1 02 02 01 0059	Belanja Tagihan Telepon	2 834 592 300
5 1 02 02 01 0060	Belanja Tagihan Air	3 275 710 180
5 1 02 02 01 0061	Belanja Tagihan Listrik	21 761 890 657
5 1 02 02 01 0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	10 369 260 000
5 1 02 02 01 0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	20 725 566 320
5 1 02 02 01 0064	Belanja Paket/Pengiriman	296 600 000
5 1 02 02 01 0066	Belanja Registrasi/Keanggotaan	1 182 000 000
5 1 02 02 01 0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4 344 000 000
5 1 02 02 01 0068	Belanja Rekening Penerangan Jalan Umum	40 000 000 248
5 1 02 02 01 0070	Belanja Ganti Rugi kepada Pihak Ketiga Akibat Kecelakaan	1 800 000
5 1 02 02 01 0073	Belanja Medical Check Up	580 000 000
5 1 02 02 02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	115 724 731 500
5 1 02 02 02 0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	610 243 300
5 1 02 02 02 0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3	88 567 264 800
5 1 02 02 02 0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	21 100 800 000
5 1 02 02 02 0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	2 294 450 400
5 1 02 02 02 0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	2 819 973 000
5 1 02 02 02 0008	Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	332 000 000
5 1 02 02 03	Belanja Sewa Tanah	250 000 000
5 1 02 02 03 0004	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja	200 000 000
5 1 02 02 03 0005	Belanja Sewa Tanah untuk Bangunan Gedung Sarana Olahraga	50 000 000
5 1 02 02 04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	47 810 835 458
5 1 02 02 04 0012	Belanja Sewa Alat Besar Darat Lainnya	50 929 759
5 1 02 02 04 0022	Belanja Sewa Electric Generating Set	815 100 000
5 1 02 02 04 0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	3 083 600 000
5 1 02 02 04 0037	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	19 600 000
5 1 02 02 04 0043	Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	715 000 000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JEJENJANG, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBAYARAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 02 04 0048	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Barang	77 900 000
5 1 02 02 04 0049	Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	387 500 000
5 1 02 02 04 0115	Belanja Sewa Alat Reproduksi (Penggandaan)	138 000 000
5 1 02 02 04 0117	Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	323 000 000
5 1 02 02 04 0121	Belanja Sewa Alat Pendingin	172 480 000
5 1 02 02 04 0123	Belanja Sewa Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35 005 575 699
5 1 02 02 04 0132	Belanja Sewa Peralatan Studio Audio	15 400 000
5 1 02 02 04 0133	Belanja Sewa Peralatan Studio Video dan Film	1 061 625 000
5 1 02 02 04 0137	Belanja Sewa Alat Studio Lainnya	5 653 625 000
5 1 02 02 04 0364	Belanja Sewa Photo and Film Equipment	71 500 000
5 1 02 02 04 0494	Belanja Sewa Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya	220 000 000
5 1 02 02 05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	18 633 562 000
5 1 02 02 05 0001	Belanja Sewa Bangunan Gedung Kantor	300 000 000
5 1 02 02 05 0002	Belanja Sewa Bangunan Gudang	1 400 000 000
5 1 02 02 05 0006	Belanja Sewa Bangunan Kesehatan	900 000 000
5 1 02 02 05 0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	1 370 000 000
5 1 02 02 05 0012	Belanja Sewa Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	200 000 000
5 1 02 02 05 0030	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	5 700 000 000
5 1 02 02 05 0033	Belanja Sewa Bangunan Parkir	72 000 000
5 1 02 02 05 0037	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	4 275 000 000
5 1 02 02 05 0043	Belanja Sewa Hotel	2 736 562 000
5 1 02 02 05 0050	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	1 680 000 000
5 1 02 02 06	Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi	20 000 000
5 1 02 02 06 0071	Belanja Sewa Bangunan Pembuang Air Kotor	20 000 000
5 1 02 02 07	Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya	3 960 500 000
5 1 02 02 07 0021	Belanja Sewa Musik Lainnya	75 000 000
5 1 02 02 07 0028	Belanja Sewa Alat Musik	10 000 000
5 1 02 02 07 0057	Belanja Sewa Tanaman	3 875 500 000
5 1 02 02 08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	6 598 463 862
5 1 02 02 08 0002	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Arsitektural	3 216 355 000
5 1 02 02 08 0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	121 000 000
5 1 02 02 08 0015	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan Wilayah	300 000 000
5 1 02 02 08 0016	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Jasa Perencanaan dan Perancangan Lingkungan Bangunan dan Landscape	700 181 362
5 1 02 02 08 0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	1 000 000 000
5 1 02 02 08 0018	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Arsitektur	497 916 500
5 1 02 02 08 0019	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	338 011 000
5 1 02 02 08 0023	Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Penataan Ruang	425 000 000
5 1 02 02 09	Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	42 335 000 000
5 1 02 02 09 0002	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Transportasi	2 400 000 000
5 1 02 02 09 0003	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Telematika	3 675 000 000
5 1 02 02 09 0008	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Bidang-Kesehatan	720 000 000
5 1 02 02 09 0011	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei	6 830 000 000
5 1 02 02 09 0012	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Studi Penelitian dan Bantuan Teknik	12 460 000 000
5 1 02 02 09 0013	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Konsultansi Manajemen	5 400 000 000
5 1 02 02 09 0014	Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Khusus	10 550 000 000
5 1 02 02 09 0019	Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisata	300 000 000
5 1 02 02 10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	135 650 000
5 1 02 02 10 0008	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	90 000 000
5 1 02 02 10 0017	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Kesehatan	45 650 000
5 1 02 02 11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	740 000 000
5 1 02 02 11 0002	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2	140 000 000
5 1 02 02 11 0003	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3	600 000 000
5 1 02 02 12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	25 716 710 000
5 1 02 02 12 0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	25 716 710 000
5 1 02 02 13	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	12 055 827 500
5 1 02 02 13 0006	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hotel	975 000 000
5 1 02 02 13 0007	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Restoran	2 050 000 000
5 1 02 02 13 0008	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Hiburan	540 000 000
5 1 02 02 13 0009	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Reklame	600 000 000
5 1 02 02 13 0010	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Penerangan Jalan	2 200 000 000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 02 13 0011	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Parkir	963 952 500
5 1 02 02 13 0012	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Air Tanah	48 000 000
5 1 02 02 13 0013	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet	375 000
5 1 02 02 13 0015	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan	2 278 500 000
5 1 02 02 13 0016	Belanja Insentif Pegawai Non ASN atas Pemungutan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	2 400 000 000
5 1 02 02 14	Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	193 585 000
5 1 02 02 14 0014	Belanja Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah	193 585 000
5 1 02 02 15	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud	1 235 250 000
5 1 02 02 15 0002	Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	1 235 250 000
5 1 02 03	Belanja Pemeliharaan	75 370 57 035
5 1 02 03 01	Belanja Pemeliharaan Tanah	14 672 567 838
5 1 02 03 01 0029	Belanja Pemeliharaan Tanah-Lapangan-Tanah untuk Taman	14 672 567 838
5 1 02 03 02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dari Mesin	32 088 648 100
5 1 02 03 02 0022	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Electric Generating Set	223 820 000
5 1 02 03 02 0025	Belanja Pemeliharaan Alat Besar-Alat Bantu-Unit Pemeliharaan Lapangan	139 300 000
5 1 02 03 02 0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	17 185 459 750
5 1 02 03 02 0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	1 113 300 000
5 1 02 03 02 0037	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2 825 346 250
5 1 02 03 02 0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	534 556 400
5 1 02 03 02 0049	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Apung Bermotor-Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	467 440 000
5 1 02 03 02 0096	Belanja Pemeliharaan Alat Bengkel dan Alat Ukur-Alat Ukur-Alat Penguji Kendaraan Bermotor	164 000 000
5 1 02 03 02 0115	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Reproduksi (Penggunaan)	402 000 000
5 1 02 03 02 0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	2 787 440 000
5 1 02 03 02 0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	1 921 410 000
5 1 02 03 02 0123	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	250 000 000
5 1 02 03 02 0133	Belanja Pemeliharaan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar-Alat Studio-Peralatan Studio Video dan Film	300 000 000
5 1 02 03 02 0204	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Umum	00 000 000
5 1 02 03 02 0207	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Bedah	50 000 000
5 1 02 03 02 0214	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Poliklinik	50 000 000
5 1 02 03 02 0218	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Radiodiagnostic	100 000 000
5 1 02 03 02 0224	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Gawat Darurat	50 000 000
5 1 02 03 02 0227	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran ICU	100 000 000
5 1 02 03 02 0232	Belanja Pemeliharaan Alat Kedokteran dan Kesehatan-Alat Kedokteran-Alat Kedokteran Lainnya	50 000 000
5 1 02 03 02 0375	Belanja Pemeliharaan Alat Laboratorium-Alat Laboratorium Standarisasi Kalibrasi dan Instrumentasi-Alat Laboratorium Uji Perangkat	10 000 000
5 1 02 03 02 0404	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Jaringan	60 000 000
5 1 02 03 02 0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	1 762 950 000
5 1 02 03 02 0407	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mainframe	16 000 000
5 1 02 03 02 0408	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Mini Computer	38 690 000
5 1 02 03 02 0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	43 800 000
5 1 02 03 02 0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1 342 050 000
5 1 02 03 02 0493	Belanja Pemeliharaan Rambu-Rambu-Rambu-Rambu Lalu Lintas Dara -Rambu Tidak Bersuar	1 085 700
5 1 02 03 03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24 712 399 837
5 1 02 03 03 0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	21 147 428 137
5 1 02 03 03 0002	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gudang	198 799 200
5 1 02 03 03 0006	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Kesehatan	82 833 000
5 1 02 03 03 0016	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Perpustakaan	845 285 100
5 1 02 03 03 0025	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Terbuka	367 710 000
5 1 02 03 03 0036	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Taman	145 000 000
5 1 02 03 03 0053	Belanja Pemeliharaan Monumen-Candi/Tugu Peringatan/Prasasti-Bangunan Peninggalan	1 925 344 400
5 1 02 03 04	Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	2 356 901 260
5 1 02 03 04 0026	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi	1 528 400
5 1 02 03 04 0027	Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembuang Irigasi	2 355 372 860
5 1 02 03 06	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud	1 540 000 000
5 1 02 03 06 0005	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software	1 350 000 000
5 1 02 03 06 0009	Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Aset Tidak Berwujud Lainnya	190 000 000
5 1 02 04	Belanja Perjalanan Dinas	262 526 952 300
5 1 02 04 01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	247 961 952 300
5 1 02 04 01 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	87 399 500 000
5 1 02 04 01 0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	45 276 850 000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 1 02 04 01 0004	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1 14 650 102 300
5 1 02 04 01 0005	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	635 500 000
5 1 02 04 02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	14 565 000 000
5 1 02 04 02 0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa AirLuar Negeri	14 565 000 000
5 1 02 05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	7 274 915 000
5 1 02 05 01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	6 750 775 000
5 1 02 05 01 0001	Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	4 531 875 000
5 1 02 05 01 0002	Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi	2 200 000 000
5 1 02 05 01 0004	Belanja Penanganan Dampak Sosial Kemasyarakatan	18 900 000
5 1 02 05 02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	524 140 000
5 1 02 05 02 0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	120 000 000
5 1 02 05 02 0002	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat	404 140 000
5 1 02 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	140 648 900 000
5 1 02 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	140 648 900 000
5 1 02 88 88 88 88	Belanja Barang dan Jasa BOS	140 648 900 000
5 1 02 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89 472 056 448
5 1 02 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89 472 056 448
5 1 02 99 99 99 99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	89 472 056 448
5 1 05	Belanja Hibah	168 832 663 023
5 1 05 01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	52 972 452 771
5 1 05 01 01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	35 000 000 000
5 1 05 01 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	35 000 000 000
5 1 05 01 02	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	17 972 452 771
5 1 05 01 02 0001	Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	17 972 452 771
5 1 05 05	Belanja Hibah kepada Badan Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	112 584 390 252
5 1 05 05 01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49 688 371 500
5 1 05 05 01 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	49 688 371 500
5 1 05 05 02	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	48 762 934 140
5 1 05 05 02 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	47 277 756 000
5 1 05 05 02 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1 485 178 140
5 1 05 05 03	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	14 133 084 612
5 1 05 05 03 0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	10 797 955 000
5 1 05 05 03 0002	Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	3 335 129 612
5 1 05 07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3 275 820 000
5 1 05 07 01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3 275 820 000
5 1 05 07 01 0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	3 275 820 000
5 1 06	Belanja Bantuan Sosial	5 060 000 000
5 1 06 01	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	5 060 000 000
5 1 06 01 01	Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu	5 060 000 000
5 1 06 01 01 0001	Belanja Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	5 060 000 000
5 2	BELANJA MODAL	1 809.867.286.993
5 2 01	Belanja Modal Tanah	23 100 000 000
5 2 01 01	Belanja Modal Tanah	23 100 000 000
5 2 01 01 03	Belanja Modal Lapangan	23 100 000 000
5 2 01 01 03 0012	Belanja Modal Tanah untuk Makam	23 100 000 000
5 2 02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	407 805 406 515
5 2 02 01	Belanja Modal Alat Besar	14 639 010 072
5 2 02 01 01	Belanja Modal Alat Besar Darat	14 046 164 250
5 2 02 01 01 0002	Belanja Modal Grader	2 137 822 250
5 2 02 01 01 0003	Belanja Modal Excavator	8 571 160 000
5 2 02 01 01 0005	Belanja Modal Loader	3 250 000 000
5 2 02 01 01 0011	Belanja Modal Mesin Proses	87 182 000
5 2 02 01 03	Belanja Modal Alat Bantu	592 845 822
5 2 02 01 03 0005	Belanja Modal Pompa	5 087 572
5 2 02 01 03 0006	Belanja Modal Mesin Bor	72 179 250
5 2 02 01 03 0014	Belanja Modal Peralatan SAR Mountenering	9 790 000
5 2 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan	124 810 850 600
5 2 02 02 01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	101 315 074 000
5 2 02 02 01 0001	Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	1 811 815 000

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 2 02 02 01 0002	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang	67 215 250 000
5 2 02 02 01 0003	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1 463 960 000
5 2 02 02 01 0004	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Dua	2 293 000 000
5 2 02 02 01 0005	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Beroda Tiga	741 637 000
5 2 02 02 01 0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	22 322 680 000
5 2 02 02 01 0009	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	5 466 732 000
5 2 02 02 02	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	1 795 165 600
5 2 02 02 02 0001	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Angkutan Barang	1 788 145 600
5 2 02 02 02 0002	Belanja Modal Kendaraan Tak Bermotor Penumpang	7 020 000
5 2 02 02 03	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	21 700 611 000
5 2 02 02 03 0002	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	21 661 936 000
5 2 02 02 03 0005	Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Lainnya	38 675 000
5 2 02 03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	4 666 263 496
5 2 02 03 01	Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	382 9 296
5 2 02 03 01 0001	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada Fondasi	47 519 500
5 2 02 03 01 0002	Belanja Modal Perkakas Konstruksi Logam yang Transportable (Berpindah)	174 525 000
5 2 02 03 01 0005	Belanja Modal Perkakas Pengangkat Bermesin	1 972 000
5 2 02 03 01 0006	Belanja Modal Perkakas Bengkel Kayu	158 174 796
5 2 02 03 02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	48 870 000
5 2 02 03 02 0005	Belanja Modal Perkakas Standard (Standard Tools)	48 870 000
5 2 02 03 03	Belanja Modal Alat Ukur	4 235 202 200
5 2 02 03 03 0001	Belanja Modal Alat Ukur Universal	4 074 324 000
5 2 02 03 03 0008	Belanja Modal Alat Ukur/Pembanding	2 051 400
5 2 02 03 03 0010	Belanja Modal Alat Timbangan/Biara	154 880 000
5 2 02 03 03 0021	Belanja Modal Alat Ukur Lainnya	3 946 800
5 2 02 04	Belanja Modal Alat Pertanian	132 475 500
5 2 02 04 01	Belanja Modal Alat Pengolahan	132 475 500
5 2 02 04 01 0001	Belanja Modal Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman	7 280 000
5 2 02 04 01 0008	Belanja Modal Alat Produksi Perikanan	53 695 500
5 2 02 04 01 0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	8 450 000
5 2 02 04 01 0010	Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya	63 050 000
5 2 02 05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	69 664 426 741
5 2 02 05 01	Belanja Modal Alat Kantor	21 029 410 918
5 2 02 05 01 0001	Belanja Modal Mesin Ketik	58 500 000
5 2 02 05 01 0003	Belanja Modal Alat Reproduksi (Penggandaan)	1 040 114 400
5 2 02 05 01 0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	1 603 459 100
5 2 02 05 01 0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	18 327 337 418
5 2 02 05 02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	47 282 537 123
5 2 02 05 02 0003	Belanja Modal Alat Pembersih	905 759 789
5 2 02 05 02 0004	Belanja Modal Alat Pendingin	5 724 719 050
5 2 02 05 02 0005	Belanja Modal Alat Dapur	328 706 400
5 2 02 05 02 0006	Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	35 028 029 752
5 2 02 05 02 0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	5 295 322 132
5 2 02 05 03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1 352 478 700
5 2 02 05 03 0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	388 119 000
5 2 02 05 03 0003	Belanja Modal Kursi Kerja Pejabat	941 359 700
5 2 02 05 03 0004	Belanja Modal Kursi Rapat Pejabat	23 000 000
5 2 02 06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	70 869 726 760
5 2 02 06 01	Belanja Modal Alat Studio	65 688 736 760
5 2 02 06 01 0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	1 631 507 000
5 2 02 06 01 0002	Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film	63 930 323 660
5 2 02 06 01 0005	Belanja Modal Peralatan Studio Pemetaan/Peralatan Ukur Tanah	26 906 100
5 2 02 06 01 0006	Belanja Modal Alat Studio Lainnya	100 000 000
5 2 02 06 02	Belanja Modal Alat Komunikasi	211 399 500
5 2 02 06 02 0001	Belanja Modal Alat Komunikasi Telephone	202 299 500
5 2 02 06 02 0002	Belanja Modal Alat Komunikasi Radio SSB	9 100 000
5 2 02 06 03	Belanja Modal Peralatan Pemancar	4 947 090 500
5 2 02 06 03 002	Belanja Modal Feeder	3 120 000 000
5 2 02 06 03 0047	Belanja Modal Sumber Tenaga	1 827 090 500
5 2 02 06 04	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi	22 500 000

KOTA MAKASSAR
 RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS OBJEK,
 RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
 TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 2 02 06 04 0007	Belanja Modal Peralatan Komunikasi Navigasi Lainnya	22 500 000
5 2 02 07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	41 135 474 016
5 2 02 07 01	Belanja Modal Alat Kedokteran	27 296 191 379
5 2 02 07 01 0001	Belanja Modal Alat Kedokteran Umum	6 751 860 250
5 2 02 07 01 0004	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah	6 829 046 729
5 2 02 07 01 0023	Belanja Modal Alat Kedokteran Bedah Ortopedi	1 935 202 000
5 2 02 07 01 0024	Belanja Modal Alat Kedokteran ICU	11 055 475 500
5 2 02 07 01 0029	Belanja Modal Alat Kedokteran Lainnya	724 606 900
5 2 02 07 02	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	13 839 282 637
5 2 02 07 02 0003	Belanja Modal Alat Kesehatan Kepolisian	67 038 360
5 2 02 07 02 0005	Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya	13 772 244 277
5 2 02 08	Belanja Modal Alat Laboratorium	78 607 100
5 2 02 08 03	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	24 007 100
5 2 02 08 03 0012	Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah Bidang Studi PKN	24 007 100
5 2 02 08 04	Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	54 600 000
5 2 02 08 04 0005	Belanja Modal System/Power Supply	54 600 000
5 2 02 10	Belanja Modal Komputer	49 178 821 086
5 2 02 10 01	Belanja Modal Komputer Unit	41 583 765 400
5 2 02 10 01 0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	10 077 195 000
5 2 02 10 01 0002	Belanja Modal Personal Computer	3 506 570 400
5 2 02 10 02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7 595 055 686
5 2 02 10 02 0001	Belanja Modal Peralatan Mainframe	235 320 000
5 2 02 10 02 0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	5 187 050 586
5 2 02 10 02 0004	Belanja Modal Peralatan Jaringan	2 172 685 100
5 2 02 15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	467 269 860
5 2 02 15 02	Belanja Modal Alat Pelindung	30 817 800
5 2 02 15 02 0003	Belanja Modal Topi Kerja	27 300 000
5 2 02 15 02 0004	Belanja Modal Sabuk Pengaman	3 517 800
5 2 02 15 03	Belanja Modal Alat SAR	436 452 060
5 2 02 15 03 0002	Belanja Modal Alat Pendukung Pencarian	436 452 060
5 2 02 18	Belanja Modal Rambu Rambu	4 110 053 500
5 2 02 18 01	Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat	4 110 053 500
5 2 02 18 01 0001	Belanja Modal Rambu Bersuar	2 886 492 200
5 2 02 18 01 0002	Belanja Modal Rambu Tidak Bersuar	1 223 561 300
5 2 02 19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	26 026 000
5 2 02 19 01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	26 026 000
5 2 02 19 01 0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	26 026 000
5 2 02 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21 960 000 000
5 2 02 88 88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21 960 000 000
5 2 02 88 88 8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	21 960 000 000
5 2 02 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6 066 401 784
5 2 02 99 99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6 066 401 784
5 2 02 99 99 9999	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	6 066 401 784
5 2 03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	764 611 652 418
5 2 03 01	Belanja Modal Bangunan Gedung	755 230 284 308
5 2 03 01 01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	740 354 040 308
5 2 03 01 01 0001	Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor	345 273 331 913
5 2 03 01 01 0006	Belanja Modal Bangunan Kesehatan	31 818 146 060
5 2 03 01 01 0008	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Ibadah	9 288 084 000
5 2 03 01 01 0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	71 778 545 080
5 2 03 01 01 0011	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	156 808 364 145
5 2 03 01 01 0012	Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar	26 876 140 200
5 2 03 01 01 0016	Belanja Modal Bangunan Gedung Perpustakaan	2 500 000 000
5 2 03 01 01 0017	Belanja Modal Bangunan Gedung Museum	3 165 992 20
5 2 03 01 01 0027	Belanja Modal Bangunan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1 000 000 000
5 2 03 01 01 0032	Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum	83 432 451 790
5 2 03 01 01 0036	Belanja Modal Tamar	8 412 985 000
5 2 03 01 02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	14 876 244 000
5 2 03 01 02 0003	Belanja Modal Rumah Negara Golongan III	14 876 244 000
5 2 03 02	Belanja Modal Monumen	1 705 287 310

KOTA MAKASSAR
RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 2 03 02 01	Belanja Modal Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	1 705 287 310
5 2 03 02 01 0002	Belanja Modal Tugu	22 974 000
5 2 03 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Peninggalan	1 483 313 310
5 2 03 04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	7 676 080 800
5 2 03 04 01	Belanja Modal Tugu/Tanda Batas	7 676 080 800
5 2 03 04 01 0004	Belanja Modal Pagar	7 676 080 800
5 2 04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	583 705 728 060
5 2 04 01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	426 529 484 661
5 2 04 01 01	Belanja Modal Jalan	405 553 333 966
5 2 04 01 01 0003	Belanja Modal Jalan Kabupaten	3 156 166 190
5 2 04 01 01 0004	Belanja Modal Jalan Kota	401 277 159 576
5 2 04 01 01 0905	Belanja Modal Jalan Desa	1 120 008 200
5 2 04 01 02	Belanja Modal Jembatan	20 976 150 695
5 2 04 01 02 0004	Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kota	16 073 701 195
5 2 04 01 02 0011	Belanja Modal Jembatan Labuh/Sandar pada Terminal	4 355 974 500
5 2 04 01 02 0012	Belanja Modal Jembatan Pengukur	546 475 000
5 2 04 02	Belanja Modal Bangunan Air	113 026 286 885
5 2 04 02 01	Belanja Modal Bangunan Air Irigasi	5 337 384 960
5 2 04 02 01 0003	Belanja Modal Bangunan Pembawa Irigasi	5 337 384 960
5 2 04 02 04	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1 260 088 000
5 2 04 02 04 0001	Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam	1 260 088 000
5 2 04 02 06	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	11 567 866 600
5 2 04 02 06 0006	Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	11 567 866 600
5 2 04 02 07	Belanja Modal Bangunan Air Kotor	94 860 947 325
5 2 04 02 07 0003	Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor	2 196 396 000
5 2 04 02 07 0006	Belanja Modal Bangunan Air Kotor Lainnya	92 664 551 325
5 2 04 03	Belanja Modal Instalasi	12 196 510 344
5 2 04 03 01	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku	1 584 230 900
5 2 04 03 01 0005	Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku Lainnya	1 584 230 900
5 2 04 03 02	Belanja Modal Instalasi Air Kotor	10 612 279 444
5 2 04 03 02 0001	Belanja Modal Instalasi Air Buangan Domestik	8 653 135 000
5 2 04 03 02 0004	Belanja Modal Instalasi Air Kotor Lainnya	1 959 144 444
5 2 04 04	Belanja Modal Jaringan	31 953 446 170
5 2 04 04 02	Belanja Modal Jaringan Listrik	31 953 446 170
5 2 04 04 02 0003	Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya	31 953 446 170
5 2 05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	22 229 500 000
5 2 05 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	52 350 000
5 2 05 01 01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak	42 600 000
5 2 05 01 01 0001	Belanja Modal Buku Umum	26 000 000
5 2 05 01 01 0003	Belanja Modal Buku Agama	9 100 000
5 2 05 01 01 0003	Belanja Modal Buku Arsitektur, Kesenian, dan Olahraga	7 500 000
5 2 05 01 03	Belanja Modal Kartografi, Naskah, dan Lukisan	9 750 000
5 2 05 01 03 0003	Belanja Modal Lukisan dan Ukiran	9 750 000
5 2 05 02	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	211 750 000
5 2 05 02 01	Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian	200 000 000
5 2 05 02 01 0001	Belanja Modal Alat Musik	200 000 000
5 2 05 02 03	Belanja Modal Tanda Penghargaan	11 750 000
5 2 05 02 03 0001	Belanja Modal Tanda Penghargaan Bidang Olahraga	11 750 000
5 2 05 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21 965 400 000
5 2 05 88 88	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21 965 400 000
5 2 05 88 88 8888	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS	21 965 400 000
5 2 06	Belanja Modal Aset Lainnya	8 415 000 000
5 2 06 01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	6 415 000 000
5 2 06 01 01	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud	6 415 000 000
5 2 06 01 01 0002	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Lisensi dan Franchise	115 000 000
5 2 06 01 01 0005	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software	6 300 000 000
5 2 06 99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2 000 000 000
5 2 06 99 99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2 000 000 000
5 2 06 99 99 9999	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	2 000 000 000
5 3	BELANJA TIDAK TERDUGA	30 000.000.000

KOTA MAKASSAR

RINGKASAN PENJABARAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK, JENIS, OBJEK,
RINCIAN OBJEK, SUB RINCIAN OBJEK PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2023

Kode	Uraian	Jumlah
5 3 01	Belanja Tidak Terduga	30 000 000 000
5 3 01 01	Belanja Tidak Terduga	30 000 000 000
5 3 01 01 01	Belanja Tidak Terduga	30 000 000 000
5 3 01 01 01 000 ¹	Belanja Tidak Terduga	30 000 000 000
	Jumlah Belanja	5 648.477.147.700
	Total Surplus/(Defisit)	(882.038.716.860)
6	PEMBIAYAAN	
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	892.038 716 860
6 1 01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	892 038 716 860
6 1 01 05	Penghematan Belanja	892 038 716 860
6 1 01 05 01	Penghematan Belanja-Belanja Operasi	500 209 938 588
6 1 01 05 01 0007	Penghematan Belanja Barang dan Jasa-Barang	500 209 938 588
6 1 01 05 02	Penghematan Belanja-Belanja Modal	391 828 778 272
6 1 01 05 02 0021	Penghematan Belanja Modal Gedung dan Bangunan-Bangunan Gedung	391 828 778 272
	Jumlah Penerimaan Pembiayaan	892.038.716 860
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	10 000 000 000
6 2 02	Penyertaan Modal Daerah	10 000 000 000
6 2 02 02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	10 000 000 000
6 2 02 02 01	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10 000 000 000
6 2 02 02 01 0001	Penyertaan Modal Daerah pada BUMD	10 000 000 000
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	10 000.000.000
	Pembiayaan Netto	882.038.716.860
6 3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Daerah Tahun Berkenaan	0

Walikota Makassar



MOH RAMDHAN POMANTO